

# Analisis Prioritas Perbaikan Infrastruktur Dasar Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya

Heri Azwansyah

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura, Pontianak Indonesia

\*Koresponden email: heriazwansyah@civil.untan.ac.id

Diterima: 25 Mei 2024

Disetujui: 5 Juli 2024

## Abstract

Adequate village infrastructure can facilitate all social and economic activities of the community. The overall objective of this study was to identify the priorities and strategies for infrastructure improvement in the village of Pematang Tujuh. Data were collected through observation and interviews. Data analysis includes priority analysis and strategies for infrastructure improvement. This study found that the priority for infrastructure improvement is the agricultural sector with an accessibility score of 11.32. The priority for improving access in the agricultural sector is to repair/improve farm roads and market access roads. Road improvements will be carried out by improving the quality of roads through concrete or asphalt paving, and by widening village roads so that they can be used by four-wheeled vehicles. Transport facilities are needed in the market sector with an accessibility score of 10.68. Improving the accessibility of transport facilities takes the form of organising public transport or village transport as a means of village transport. Treatment in terms of priority facilities is carried out in the clean water sector with a facility accessibility value of 16.57. Strategies to improve accessibility in the clean water sector can be done by adding rainwater reservoirs (PAH) or installing clean water networks.

**Keywords:** *priority analytics, infrastructure, accessibility value, kubu raya district*

## Abstrak

Infrastruktur desa yang memadai dapat memperlancar segala aktivitas sosial dan ekonomi penduduk. Tujuan umum dari studi ini adalah menentukan prioritas dan strategi perbaikan infrastruktur di Desa Pematang Tujuh. Data dikumpulkan melalui observasi, dan wawancara. Analisis data meliputi analisis prioritas, dan strategi perbaikan infrastruktur. Penelitian ini menghasilkan bahwa prioritas untuk dilakukan perbaikan infrastruktur adalah sektor pertanian dengan nilai aksesibilitas 11,32. Prioritas perbaikan akses di sektor pertanian adalah dengan perbaikan/peningkatan jalan usaha tani dan jalan akses ke pasar. Perbaikan/peningkatan jalan dilakukan dengan memperbaiki kualitas jalan berupa jalan cor beton atau aspal, dan melebar jalan desa sehingga bisa dilewati kendaraan roda 4. Sarana transportasi sangat diperlukan pada sektor pasar dengan nilai aksesibilitas sebesar 10,68. Peningkatan aksesibilitas sarana transportasi berupa mengadakan angkutan umum atau angkutan desa sebagai sarana transportasi desa. Penanganan dari sisi fasilitas prioritas dilakukan pada sektor air bersih dengan nilai aksesibilitas fasilitas sebesar 16,57. Strategi untuk meningkatkan aksesibilitas pada sektor air bersih dapat dilakukan dengan menambah tempat penampungan air hujan (PAH) atau pemasangan jaringan air bersih.

**Kata Kunci:** *analisis prioritas, infrastruktur, nilai aksesibilitas, kabupaten kubu raya*

## 1. Pendahuluan

Pembenahan infrastruktur merupakan salah satu cara yang signifikan untuk mempercepat proses kemajuan wilayah. Selain itu, infrastruktur merupakan kontributor signifikan terhadap ekspansi ekonomi (Mlik et al., 2022). Peningkatan infrastruktur dalam sebuah wilayah menjadi penopang pembangunan negara (Markus, 2021). Ketersediaan infrastruktur akan memberikan dampak pada sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Akses masyarakat terhadap sumber daya dapat ditingkatkan melalui kesiapan infrastruktur sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah [1], [2], [3].

Kawasan perdesaan merupakan kawasan pemukiman yang kondisi tanah, iklim, dan perairannya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan penduduknya dalam menjalani gaya hidup agraris [4]. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, termasuk menciptakan lingkungan yang dapat mengembangkan potensi desa [5]. Infrastruktur wilayah desa dimaknai sebagai prasarana dan sarana desa yang bersifat fisik dan menawarkan akses terhadap kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial dan ekonomi bagi warga desa [6].

Ketersediaan infrastruktur desa sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan memperlancar segala aktivitas sosial dan ekonomi penduduk [7]. Kurangnya infrastruktur yang memadai, khususnya di daerah pedesaan, merupakan salah satu hambatan bagi pembangunan ekonomi. Pelayanan infrastruktur pedesaan secara umum masih berada dalam kondisi yang buruk [8]. Pembangunan fisik infrastruktur pedesaan dapat memberikan masyarakat pedesaan akses terhadap layanan sosial ekonomi dan dasar [9]. Meskipun telah dipahami bahwa hal ini memiliki peran penting dalam upaya mencapai tujuan, namun tidak ada kemajuan berarti yang dicapai oleh pihak yang terlibat dalam peningkatan pemberdayaan dalam proses penataan infrastruktur dasar di desa ini.

Aksesibilitas merupakan penilaian kemudahan atau kenyamanan yang menghubungkan kawasan penggunaan lahan satu sama lain, dan betapa mudah atau sulitnya mencapai kawasan tersebut melalui jaringan transportasi [10]. Aksesibilitas wilayah desa dapat diartikan sebagai kesanggupan, taraf kesulitan dalam memakai, meraih atau memperoleh produk dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa [11]. Kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut dengan aksesibilitas wilayah. Aksesibilitas yang memadai akan mempermudah hubungan penduduk antar daerah sehingga menyebabkan perkembangan wilayah menjadi merata [12].

Perbaikan infrastruktur desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat [13]. Perubahan cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia dari top down menjadi bottom up memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan [14]. Program perencanaan dan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan melibatkan masyarakat akan memberikan kesempatan kerja, dan akan menumbuhkan tanggung jawab bagi keberlanjutan infrastruktur pedesaan yang ada [6]. Proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan keikutsertaan masyarakat sangat cocok diterapkan di wilayah pedesaan karena pembangunan infrastruktur pedesaan secara umum bersifat sederhana dan masih dalam jangkauan kemampuan masyarakat desa dimana teknologi yang digunakan juga cukup sederhana.

Adanya program alokasi dana desa memungkinkan desa untuk membangun desa lebih baik dan lebih maju [15]. Pematang Tujuh merupakan Desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Desa Pematang Tujuh memiliki luas wilayah sebesar 2,28 km<sup>2</sup> atau 2,05% dari luas wilayah Kecamatan Rasau Jaya yang mempunyai luas 111,03 km<sup>2</sup>.

Meskipun Pematang Tujuh ini berada relatif tidak jauh dari ibu kota kabupaten yaitu berjarak 32 km, namun infrastruktur dasar masih perlu perbaikan dan dilakukan peningkatan untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa penduduk desa. Desa ini terus membangun infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan maju.

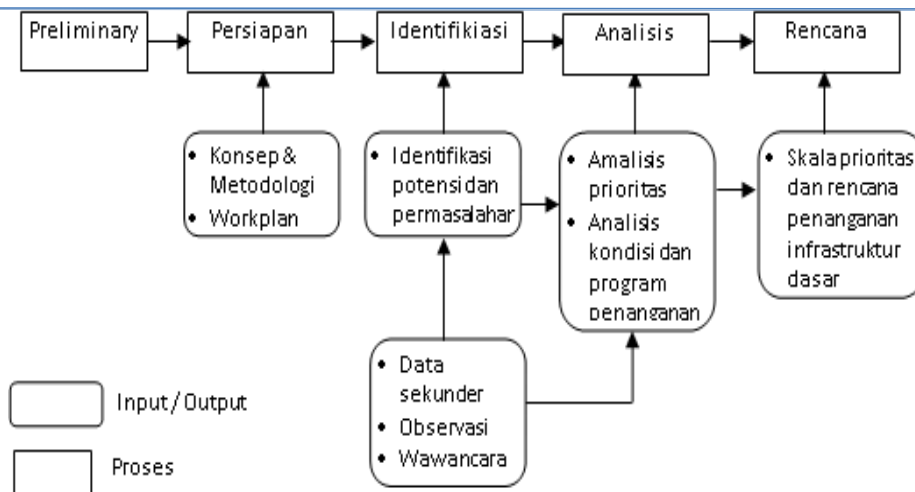
## 2. Metode Penelitian

### Tahapan Penelitian

Poses penelitian ini mengacu kepada garis besar tahapan penelitian yang diilustrasikan pada **Gambar**

1. Garis besar tahapan penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahapan yang mendasarinya yaitu melakukan studi awal yaitu mempelajari kajian-kajian yang lalu yang dikuatkan dengan studi referensi.
- b. Tahap penyusunan kegiatan yaitu perencanaan pelaksanaan yang meliputi penyiapan bahan, gagasan, pendekatan, dan penyiapan rencana kerja untuk tahapan selanjutnya.
- c. Tahap identifikasi yaitu mengenali potensi dan permasalahan kerangka penting yang ada. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengidentifikasi yaitu informasi masukan, baik sebagai informasi penting yang berasal dari tinjauan lapangan maupun pertemuan langsung dengan penduduk setempat, maupun informasi penunjang yang dilakukan dengan mengambil informasi pendukung dari institusi-institusi terkait.
- d. Pada tahap proses analisis ini, informasi dan masukan diperoleh dengan mengumpulkan informasi dari tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Penentuan kebutuhan dan penanganan dilakukan berdasarkan tingkat prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
- e. Pada tahap hasil, yang disampaikan yaitu kemajuan di lapangan yang telah melahirkan ide dan rencana pembangunan infrastruktur desa yang dihubungkan perencanaan dan pembangunan wilayah.



**Gambar 1.** Garis Besar Tahapan Penelitian

### Pengumpulan Data

Kebutuhan data dan cara memperolehnya sebagai berikut :

#### A. Pengalaman di Lapangan

Pengamatan di lapangan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan keadaan dan permasalahan yang ada di lapangan, melakukan pemeriksaan ulang terhadap informasi yang ada, dan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengkaji potensi dan permasalahan. Dalam tindakan ini, informasi yang diperlukan meliputi:

- Infrastruktur dasar dan kondisi fisik wilayah studi.
- Informasi mengenai keadaan jaringan infrastruktur eksisting.

#### B. Interview

Interview diarahkan untuk mendapatkan informasi dan data yang ada dan rencana kegiatan terkait dengan pengembangan infrastruktur dasar. Interview dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat setempat (pendidik, agama, pemuda dan ibu-ibu), pemerintah desa, dan lain-lain. Sampel diambil sebanyak 120 responden dimana masing-masing dusun (Dusun Suka Damai dan Dusun Sepakat Maju) berjumlah 60 responden. Daftar pertanyaan diberikan kepada responden meliputi bidang infrastruktur: pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan, pasar, air bersih, listrik dan perkebunan. Tiap-tiap bidang infrastruktur memiliki indikator yaitu: populasi, kondisi, prasarana dan sarana transportasi, fasilitas pelayanan, jumlah keluarga, kualitas dan jenis fasilitas yang digunakan; jarak, waktu dan biaya perjalanan, dan pandangan individu terhadap masalah dan kebutuhan.

### Analisis Data

Pada penelitian ini dilaksanakan analisis prioritas dan analisis perbaikan aksesibilitas. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### □ Skala Prioritas

Penentuan skala prioritas dilakukan dengan menentukan nilai aksesibilitas dimana pada bagian ini ditentukan skala prioritas penanganan infrastruktur berdasarkan nilai aksesibilitas [16].

Terdapat 4 (empat) langkah analisis yang harus dilakukan untuk menentukan tingkat prioritas sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4, yaitu:

##### i. Penetapan nilai indikator

Tiap-tiap indikator memiliki kriteria dan nilai kriterianya yang diberikan menurut keadaan aksesibilitasnya. Indikator suatu infrastruktur dalam kondisi terbaik diberikan nilai paling rendah, sedangkan kondisi indikator tersebut terjelek diberikan nilai paling tinggi. Sehingga pada kuesioner survei interview diklasifikasikan 5 tingkatan, yaitu (1) sangat tinggi, (2) tinggi, (3) sedang, (4) rendah, dan (5) sangat rendah.

##### ii. Penetapan bobot indikator

Tingkat kepentingan dari suatu indikator menjadi dasar dalam menentukan nilai bobot indikator. Semakin kecil nilai bobot yang diberikan pada suatu indikator maka semakin tidak penting indikator tersebut dalam perbaikan aksesibilitas. Sebaliknya, semakin besar nilai bobot yang diberikan pada suatu indikator maka semakin penting indikator tersebut dalam perbaikan

aksesibilitas. Dalam kuesioner yang dibuat 5 pilihan, yaitu: (1) bobot tidak penting, (2) bobot kurang penting, (3) bobot agak penting, (4) bobot lumayan penting, dan (5) bobot sangat penting

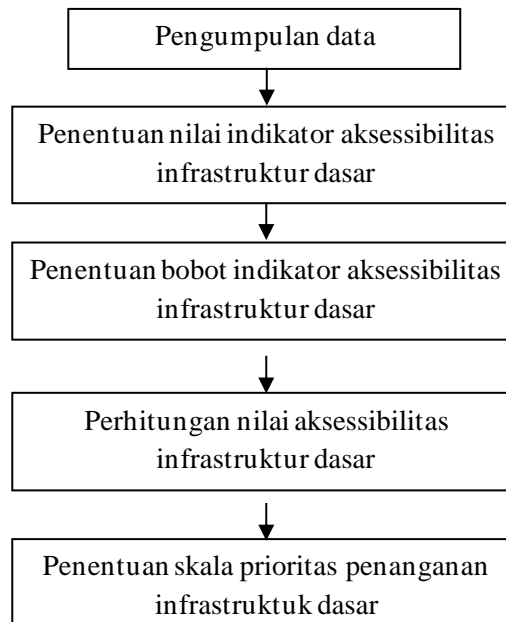
iii. Perhitungan nilai aksesibilitas

Formula yang digunakan dalam perhitungan nilai aksesibilitas adalah Persamaan 1 yaitu :

$$\text{Nilai Aksesibilitas} = (\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot Indikator}) \quad (1)$$

iv. Penentuan Tingkat Prioritas

Penentuan tingkat prioritas berdasarkan nilai aksesibilitas / manfaat jalan, yaitu nilai paling tinggi merupakan prioritas pertama, prioritas berikutnya adalah nilai aksesibilitas yang ada di bawahnya demikian seterusnya hingga nilai terendah merupakan prioritas terakhir.



**Gambar 2.** Proses Analisis Metode IRAP

### Analisis Perbaikan Infrastruktur

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan rencana perbaikan infrastruktur dasar berdasarkan kondisi lapangan [17]. Survei terhadap kondisi infrastruktur dasar dilakukan dengan melihat jenis bahan konstruksi dan kondisi prasarana.

### 3. Hasil dan Pembahasan

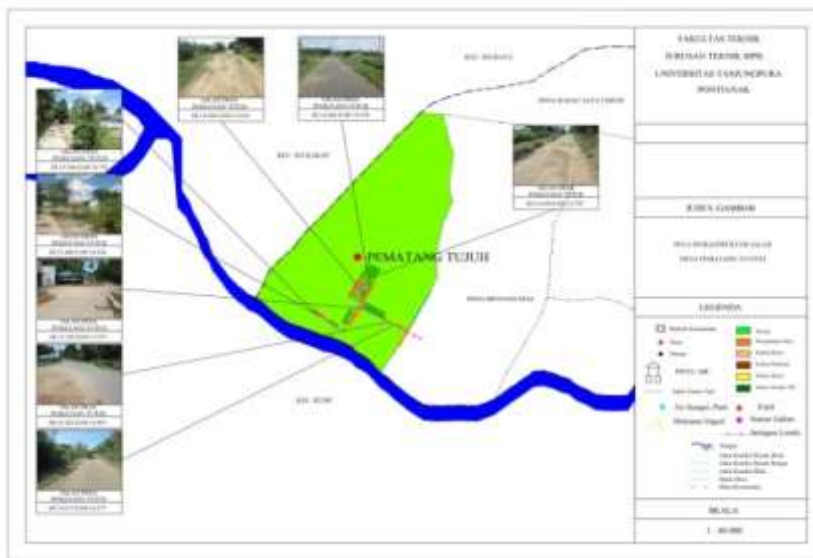
Luas wilayah Desa Pematang Tujuh sebesar 2,28 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,05% dari luas Kecamatan Rasau Jaya yaitu seluar 111,03 km<sup>2</sup>. Desa Pematang Tujuh memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 1.852 jiwa dimana kepadatan penduduk 62 jiwa per km<sup>2</sup> dan penduduk Desa Pematang Tujuh mayoritas bekerja sebagai petani. Desa Pematang Tujuh terbagi menjadi 2 Dusun yaitu Suka Damai, dan Sepakat Maju. Desa ini terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT) [18]. Desa ini mayoritas mengandalkan sektor pertanian.

#### 3.1. Kondisi Infrastruktur Jalan

Keadaan infrastruktur desa berdasarkan hasil survei bisa ditampilkan pada Gambar 3. Jalan di Desa Pematang Tujuh dapat berupa jalan aspal, jalan cor beton, dan masih ada berupa jalan tanah. Kondisinya pun beragam, ada yang dalam kondisi baik, ada pula dalam kondisi rusak hingga rusak berat. **Gambar 4** adalah peta jaringan jalan desa yang disertai dokumentasi kondisi jalan.



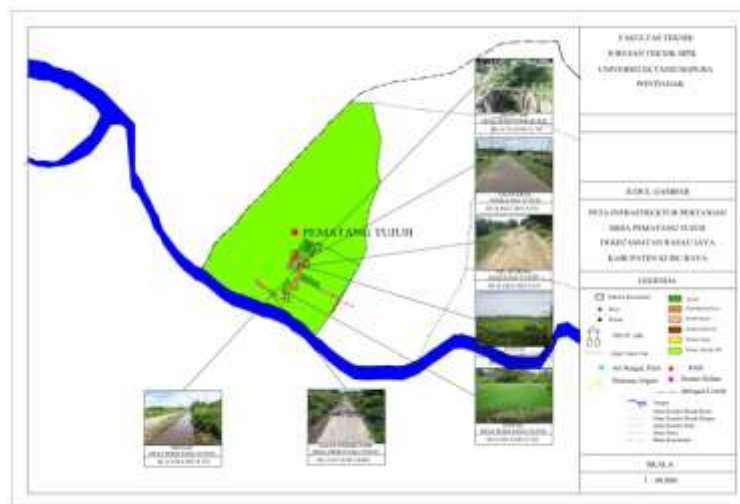
**Gambar 3.** Kondisi jalan desa



**Gambar 4.** Peta Jaringan Jalan di Desa Pematang Tujuh

### 3.2. Kondisi Infrastruktur Pertanian dan Perkebunan

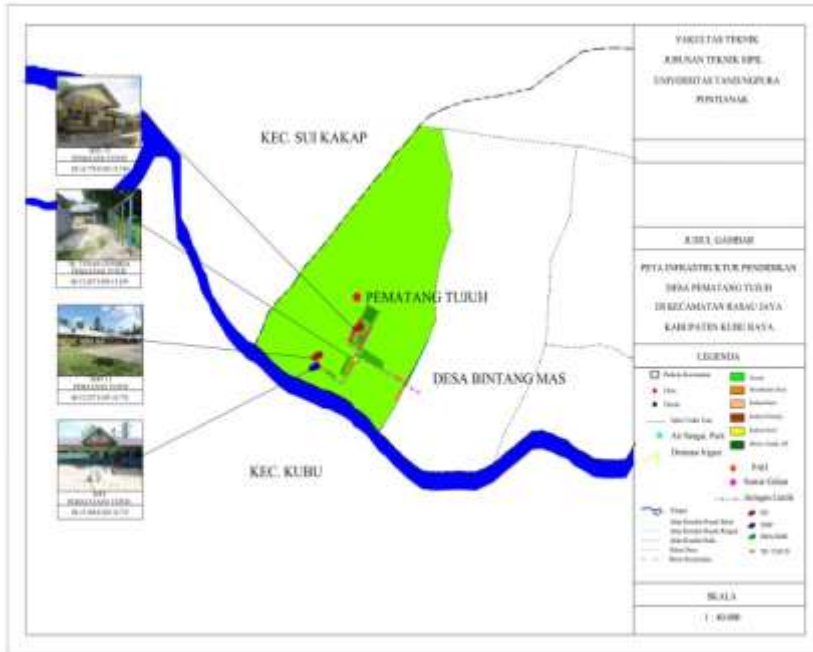
Luas fungsional sawah di Desa Pematang Tujuh sekitar 100 ha yakni sawah dengan sistem tadah hujan. Lahan pertanian dan perkebunan Desa Pematang Tujuh Berada pada daerah sepanjang jalan kecamatan yang menghubungkan kecamatan Rasau Jaya dengan Kecamatan Kakap, namun ada pula pertanian dan perkebunan di wilayah pedalaman dari Desa Pematang Tujuh.



**Gambar 5.** Sebaran Lahan Pertanian dan Perkebunan dan Kondisi Jalan Usaha Tani di Desa Pematang Tujuh

### 3.3. Kondisi Infrastruktur Pendidikan

Desa Pematang Tujuh memiliki 1 unit TK, 2 unit SDN, dan 1 unit MTs. Sementara sekolah menengah atas belum. Namun anak-anak dapat bersekolah di desa tetangga.



Gambar 6. Sebaran Prasarana Pendidikan

### 3.4. Kondisi Infrastruktur Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Pematang Tujuh hanya 1 unit Poskesdes.

### 3.5. Kondisi Air Bersih

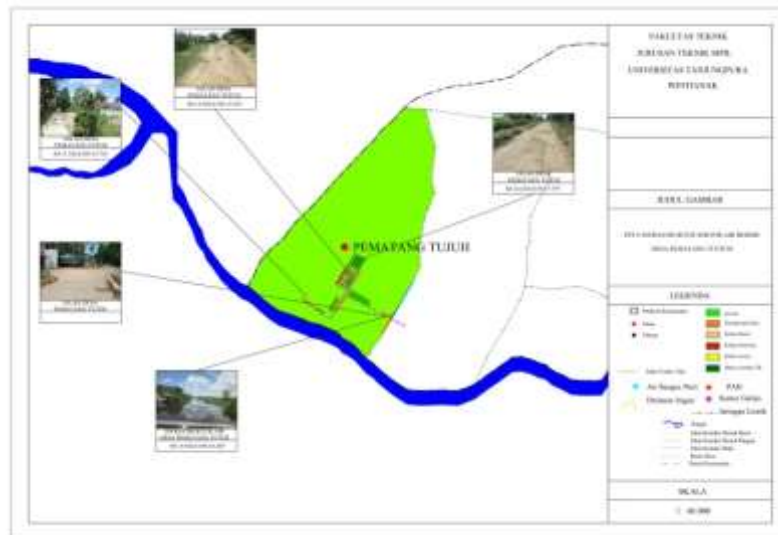
Keadaan Desa Pematang Tujuh dalam pemenuhan kebutuhan sumber air penduduk berasal dari air sungai dan PAH (penampungan air hujan). Untuk MCK masyarakat menggunakan air sungai sementara untuk masak dan minum menggunakan air hujan.

### 3.6. Kondisi Listrik

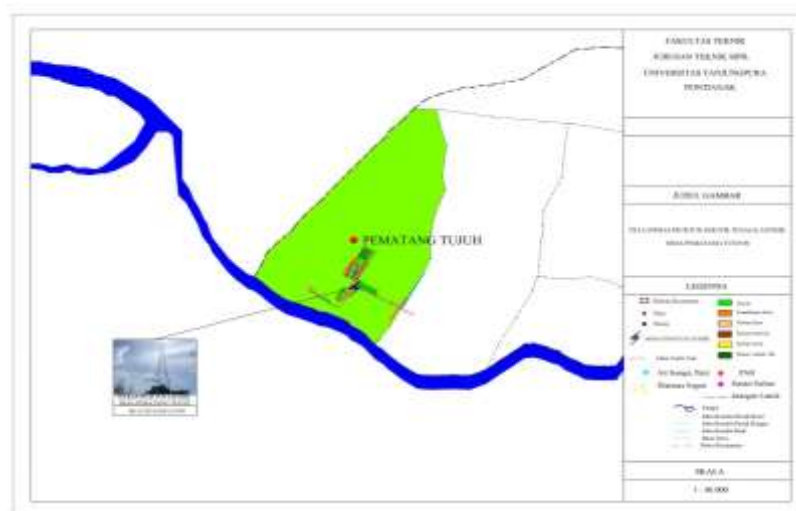
Kondisi pemenuhan listrik di Desa Pematang Tujuh adalah semua rumah di Desa Pematang Tujuh sudah teraliri listrik PLN.



Gambar 7. Sebaran Prasarana Kesehatan di Desa Pematang Tujuh



Gambar 8. Sebaran Fasilitas Sumber Air Bersih di Desa Pematang Tujuh



Gambar 9. Sebaran Jaringan Listrik di Desa Pematang Tujuh

### 3.7. Analisis Aksesibilitas Infrastruktur

Dasar bahwa aksesibilitas adalah tingkat kesulitan digunakan dalam analisis ini. Artinya, nilai aksesibilitas berbanding lurus dengan nilai indikator dan bobot indikator. Sehingga semakin besar nilai indikator dan bobot indikator, semakin besar nilai aksesibilitas artinya semakin sulit bagi masyarakat untuk mengatasi masalah mereka. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai aksesibilitas, semakin prioritas untuk mendapatkan perbaikan infrastruktur. Dalam studi ini, dengan mempertimbangkan luas wilayah, maka jumlah responden yang diambil sebanyak 120 responden, dimana setiap dusun berjumlah 60 responden.

Langkah awal dalam perhitungan nilai aksesibilitas suatu infrastruktur adalah dengan menyusun nilai indikator aksesibilitas dari persepsi masyarakat desa yang diperoleh hasil wawancara ke rumah. Contoh diambil untuk sektor pertanian, dari persepsi 60 responden terhadap nilai indikator aksesibilitas sektor pertanian dari indikator 1 (I1) sampai indikator 10 (I10). Selanjutnya menentukan jumlah dari perkalian antara nilai indikator (Ii) dengan bobot indikator (Bi) yang bersesuaian tiap responden dari indikator 1 sampai 10. Ini dilakukan hingga 60 responden (n). Total jumlah perkalian antara nilai indikator (Ii) dengan bobot indikator (Bi) yang bersesuaian untuk 60 responden pada sektor pertanian ini sebesar 679,400. Kemudian nilai aksesibilitas merupakan total nilai ini dibagi n (jumlah responden) yaitu  $679,400/60 = 11,23$ . Untuk sektor lainnya yaitu perkebunan, pendidikan, kesehatan, pasar, air bersih, listrik dan permukiman dapat dilakukan dengan cara yang sama.

Hasil analisis nilai aksesibilitas tiap infrastruktur dasar yang ditinjau ditampilkan pada **Tabel 1**. Menurut **Tabel 1** bahwa prioritas pertama di Desa Pematang Tujuh yaitu pada sektor pertanian dengan nilai

aksesibilitas sebesar 11,32. Pada prioritas kedua terdapat sektor pasar dengan nilai 10,95 dan prioritas ketiga ditempati sektor kesehatan dengan nilai aksesibilitas sebesar 10,25.

**Tabel 1.** Rekap Nilai Aksesibilitas Infrastruktur Dasar

No	Infrastruktur	Nilai Aksesibilitas
1	Pertanian	11,32
2	Perkebunan	9,49
3	Pendidikan	10,25
4	Kesehatan	9,60
5	Pasar	10,95
6	Air bersih	8,85
7	Listrik	8,73
8	Permukiman	8,48

Sumber: Analisis data

**Tabel 2.** Rekap Analisis Nilai Aksesibilitas Aspek Transport dan Non Transport Infrastruktur Dasar

No	Infrastruktur	Nilai Aksesibilitas		
		Aspek Transport		Aspek Non-Transport
		Prasarana	Sarana	Fasilitas
1	Pertanian	17,20	10,62	12,76
2	Perkebunan	8,28	8,42	10,05
3	Pendidikan	10,72	9,17	9,02
4	Kesehatan	10,42	8,40	11,66
5	Pasar	11,73	10,68	11,02
6	Air bersih	11,35	8,57	16,57
7	Listrik	8,05	6,50	6,96
8	Permukiman	6,40	5,48	5,57

Sumber: Analisis data

Penentuan peningkatan aksesibilitas yang akan dilakukan berdasarkan **Tabel 2** dan hasil pengamatan di lapangan adalah sebagai berikut :

- Pada indikator prasarana transportasi di Desa Pematang Tujuh terdapat sektor pertanian sebagai sektor prioritas dengan nilai aksesibilitas tertinggi dengan nilai aksesibilitas prasarana transportasi sebesar 17,20. Selanjutnya terdapat sektor pasar dengan nilai aksesibilitas prasarana transportasi sebesar 11,73. Perbaikan aksesibilitas prasarana transportasi ialah dengan meningkatkan kualitas jalan dari jalan tanah menjadi jalan cor beton atau aspal, dan melebar jalan desa yang geometrik kecil sehingga bisa dilewati kendaraan roda 4.
- Nilai aksesibilitas terbesar pada indikator sarana transportasi di Desa Pematang Tujuh terdapat pada sektor pasar dimana nilai aksesibilitas sarana transportasi ialah 10,68. Selanjutnya terdapat sektor pertanian dimana nilai aksesibilitas sarana transportasi sebesar 10,62. Perbaikan aksesibilitas sarana transportasi dengan cara penyediaan angkutan desa.
- Pada aspek fasilitas, maka prioritas utama adalah sektor air bersih dengan nilai aksesibilitas sebesar 16,57. Selanjutnya terdapat sektor pertanian nilai aksesibilitas sebesar 12,76. Sektor lain yang menjadi prioritas dalam indikator fasilitas adalah sektor kesehatan dengan nilai aksesibilitas sebesar 11,66. Pendekatan intervensi untuk meningkatkan aksesibilitas pada sektor air bersih dapat dilakukan dengan menambah persediaan tempat penampungan air hujan atau pemasangan jaringan air bersih. Peningkatan aksesibilitas sektor pertanian adalah dengan peningkatan pasar khususnya peningkatan barang pertanian dengan menyediakan bahan-bahan pertanian seperti bibit, pupuk dan pestisida. Peningkatan nilai aksesibilitas sektor kesehatan yang selama ini hanya berupa poskesdes ditingkatkan dengan menambah pelayanan kesehatan diantaranya puskesmas.



#### 4. Kesimpulan

Sektor pertanian memiliki nilai aksesibilitas tertinggi dibanding sektor lainnya yaitu sebesar 11,32. Ini berarti bahwa pertanian merupakan sektor prioritas untuk dilakukan penanganan. Aspek prasarana transportasi pada sektor pertanian memiliki nilai aksesibilitas tertinggi dibandingkan aspek sarana transportasi dan fasilitas infrastruktur yaitu sebesar 17,20. Hal ini berarti perbaikan akses di sektor pertanian diutamakan adalah dengan perbaikan prasarana transportasi antara lain perbaikan/peningkatan jalan usaha tani dan jalan akses ke pasar. Perbaikan/peningkatan jalan dengan memperbaiki kualitas jalan dari jalan tanah menjadi jalan cor beton atau aspal, dan melebar jalan desa yang geometrik kecil sehingga bisa dilewati kendaraan roda 4.

Pengadaan sarana transportasi terdapat pada sektor pasar dengan nilai aksesibilitas sarana transportasi sebesar 10,68. Selanjutnya terdapat sektor pertanian dengan nilai aksesibilitas sarana transportasi sebesar 10,62. Peningkatan aksesibilitas sarana transportasi mengadakan angkutan umum atau angkutan desa sebagai sarana transportasi desa.

Penanganan dari sisi fasilitas prioritas dilakukan pada sektor air bersih dengan nilai aksesibilitas fasilitas sebesar 16,57. Selanjutnya terdapat sektor pertanian nilai aksesibilitas sebesar 12,76. Pendekatan intervensi untuk meningkatkan aksesibilitas pada sektor air bersih dapat dilakukan dengan menambah persediaan tempat penampungan air hujan (PAH) atau pemasangan jaringan air bersih. Peningkatan aksesibilitas sektor pertanian adalah dengan peningkatan pelayanan pasar khususnya peningkatan barang pertanian dengan menyediakan bahan-bahan pertanian seperti bibit, pupuk dan pestisida.

#### 5. Referensi

- [1] R. L. P. NSS, E. Suryawardana, and D. Triyani, "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang," *J. Din. Sos. Budaya*, vol. 17, no. 1, p. 82, 2015, doi: 10.26623/jdsb.v17i1.505.
- [2] I. Suswita, D. Damanik, and P. D. Panjaitan, "Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun," *J. Ekuilnomi*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2020, doi: 10.36985/ekuilnomi.v2i1.346.
- [3] A. F. Nurhidayani, P. J. Osly, and I. Ihsani, "Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Desa Di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi," *J. Infrastruktur*, vol. 4, no. 2, pp. 97–104, 2019, doi: 10.35814/infrastruktur.v4i2.698.
- [4] A. M. Gai, A. Witjaksono, and R. R. Maulida, *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. 2020. [Online]. Available: <https://my.b-ok.as/book/11521939/4f1438>
- [5] A. Ariadi, "Perencanaan Pembangunan Desa," *Meraja J.*, vol. 2, no. 2, pp. 135–147, 2019, doi: 10.51826/fokus.v2i1.737.
- [6] A. Latif, Irwan, M. Rusdi, A. Mustanir, and M. Sutrisno, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang," *J. MODERAT*, vol. 5, no. 1, pp. 1–15, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- [7] V. M. Ompusunggu, "Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.stkipgritulungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/download/870/397>
- [8] A. Asnudin, "Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat," *J. SMARTek*, vol. 7, no. 4, pp. 292–300, 2009.
- [9] F. Ishak, R. L. E. Sela, and J. A. R. Sondakh, "Evaluasi Ketersediaan Infrastruktur Perdesaan Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kecamatan Oba Tengah," *J. Spasial*, vol. 6, no. 3, pp. 872–880, 2019.
- [10] P. D. Arystiana, C. I. R. Marsiti, and N. M. Suriani, "Identifikasi Accessibility Pada Objek Wisata Di Desa Sambangan Sebagai Desa Wisata," *J. BOSAPARIS Pendidik. Kesejaht. Kel.*, vol. 12, no. 2, pp. 52–59, 2021, doi: 10.23887/jppkk.v11i3.32301.
- [11] F. A. Lestari, F. W. Ballo, and N. T. Kiak, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Iklusif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020," *J. Akunt. Transparansi Dan Akuntabilitas*, vol. 11, no. 1, pp. 51–70, 2023, doi: 10.35508/jak.v11i1.10252.
- [12] S. H. T. Sumadi, P. J. . Franklin, and I. Makainas, "Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan Di Kota Tomohon," *SPASIAL*, vol. 4, no. 1, pp. 149–158, 2015, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/view/15664/15201>

- [13] H. Azwansyah and F. Juniardi, "Telok Batang Kabupaten Kayong Utara Studi Kasus : Desa Sungai Paduan Dan Desa Mas Bangun," *J. Langkau Betang*, 2014.
- [14] K. Endah, "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa," *Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 6, no. 1, pp. 135–143, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- [15] S. Hardianti, H. Muhammad, and M. Lutfi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)," *J. Katalogis*, vol. 5, no. 1, pp. 120–126, 2017, [Online]. Available: <http://elkanagoro.blogspot.co>.
- [16] R. Nahum, "Kajian Aksesibilitas Perdesaan Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Nasional Paralel Perbatasan Yang Tepat Sasaran Dan Terintegrasi (Studi Kasus Desa-Desa Yang Di Lintasi Di Kecamatan Ketungau Hulu)," *J. Tek. Sipil Univ. Tanjungpura*, vol. 16, no. 1, pp. 1–13, 2016, [Online]. Available: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jtsuntan/article/view/24799/75676576241>
- [17] M. Agustin, "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang," *J. Mhs. Unesa*, vol. 4, no. 1, pp. 1–14, 2015.
- [18] K. R. BPS, *Kecamatan Rasau Jaya Dalam Angka 2023*. 2023. [Online]. Available: <https://kuburayakab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YmQxZGQyNmI3YzM3N2Q0ZGJiNmUwNDE0&xzmn=aHR0cHM6Ly9rdWJlcmF5YWthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGJjYXRpb24vMjAyMy8wOS8yNi9iZDFkZDI2YjdjMzc3ZDRkYmI2ZTA0MTQva2VjYW1hdGFuLXJhc2F1LWpheWETZGFsYW0tYW5na2EtMjAy>